

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas adalah suatu bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai kemanusiaan, melanggar hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang serta mengancam rasa keamanan hingga bisa merugikan masyarakat. Walaupun tindak kejahatan bukanlah persoalan baru dalam masyarakat namun kriminalitas menjadi salah satu masalah yang sulit dihindari bagi Negara sedang berkembang seperti Indonesia bahkan di negara maju sekalipun. Memang tindakan kriminal tidak bisa di hilangkan secara total akan tetapi tingkat kriminalitas yang ada hanya bisa di kurangi pada tingkat yang semimum mungkin.

Tindakan kriminal yang sering terjadi akan mengancam masyarakat sehingga kebutuhan akan rasa aman menjadi berkurang. Rasa aman juga merupakan kebutuhan manusia yang penting dan harus terpenuhi. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang ke dua setelah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Sebagaimana mestinya, kebutuhan akan rasa aman juga sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat 1 yang menyebutkan bahwa rasa aman merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diperoleh setiap warga negara.

Tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi dalam masyarakat ternyata tidak sendirinya muncul begitu saja. akan tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Menurut Separovic (1985) mengemukakan terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu: pertama, faktor personal. Termasuk di dalamnya adalah faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan faktor

psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan). Kemudian factor kedua adalah faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu (Simatupang & Faisal, 2017: 155) Disamping itu, kemajuan canggihnya teknologi informasi dan telekomunikasi juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kejahatan-kejahatan baru seperti pornografi, berbagai macam modus penipuan, *Cyber Bullying*, pencemaran nama baik dan lainnya.

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor ekonomi yang diduga menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah kriminalitas. Faktor ekonomi tersebut bisa meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan penduduk dan rendahnya pendidikan. Hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah lama dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang telah dilakukan W. A. Bonger yang menggunakan 18 negara berbeda dan membuktikan bahwa ada hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu (Putri & Saimima, 2020).

Faktor ekonomi sering dikaitkan sebagai salah satu penyebab tingginya kriminalitas dan menjadikan faktor ekonomi sebagai hal yang paling mendasar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya berasal dari kondisi perekonomian dan pendidikan yang rendah sehingga mereka akan melakukan suatu tindakan jahat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti pencurian, merampok, begal, penipuan hingga perilaku anarkis dan premanisme. Sulitnya mencari penghidupan akibat tuntutan biaya hidup yang sedemikian tinggi akhirnya mendorong individu terjun dalam dunia kejahatan seperti tindakan anarkis dan premanisme (Dulkiah, 2020) Hal ini juga dapat dibuktikan dalam sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh Edward Glaeser dan Bruce Sacerdote

menemukan bahwa terdapat sebanyak 30 persen dari faktor-faktor ekonomi menyebabkan tindak kriminal di kota-kota besar (Yanrui, 2016).

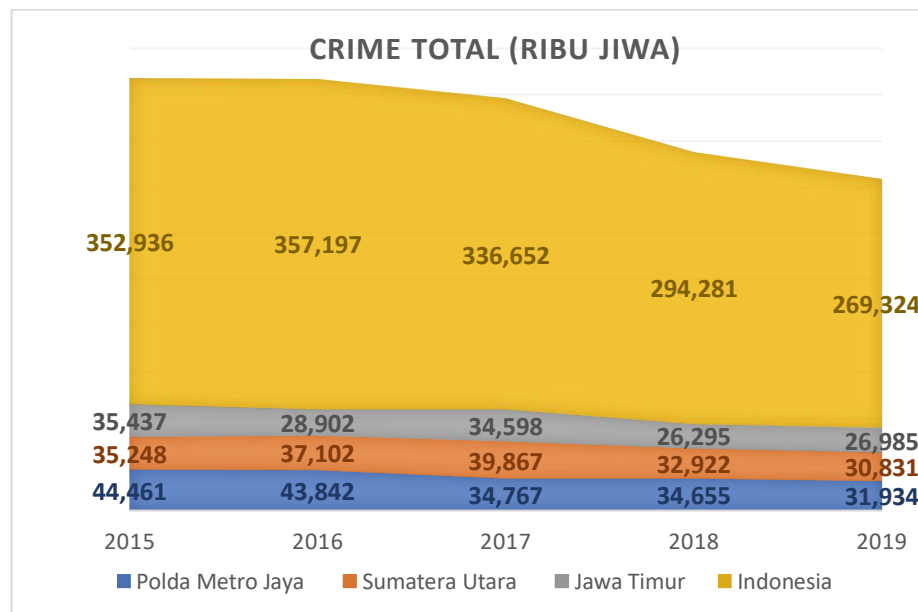
Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kejahatan yaitu meliputi (i) jumlah kejahatan (*crime total*) dimana jumlah kejahatan yang dimaksud adalah seluruh kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian atau dapat juga diartikan peristiwa kejahatan yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. (ii) angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) artinya jumlah penduduk yang beresiko terkena tindak kejahatan dan kemudian (iii) selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) yang merupakan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan selanjutnya. Namun menurut Savitz (1978) di dalam memaknai angka kejahatan perlu kewaspadaan karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusan.

Data kriminalitas dibedakan menjadi beberapa jenis tindak kejahatan, yaitu meliputi jenis kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan berimplikasi kontingensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Secara umum, data kriminalitas yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh kejahatan konvensional. Jumlah semua jenis kejahatan yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 165.918 tindak kejahatan. Sedangkan dari seluruh jumlah kejahatan yang ada, jumlah kejahatan konvensional terjadi sebanyak 134.462 kasus atau sekitar 81% dari seluruh jenis kejahatan. Sementara itu peringkat tertinggi pada kasus kejahatan konvensional adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 19.380 kasus atau 14% dari kejahatan konvensional.

Angka kriminalitas tahun 2019 di semester 1, jenis kejahatan konvensional masih mendominasi seluruh kejahatan yang terjadi di Indonesia. Adapun jumlah semua jenis kejahatan Indonesia di semester 1 tahun 2019 ada sekitar 83.705 kasus dengan jumlah jenis kejahatan konvensional sebanyak 64.583 atau sekitar 77% dari semua jenis kejahatan yang ada. Sementara itu, kasus pencurian dengan pemberatan masih menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 9.988 kasus atau 15% dari jenis kejahatan konvensional (Pusiknas Bareskrim Polri, 2019).

Berdasarkan data statistik kriminal Indonesia yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik, secara agregate tingkat kriminalitas Indonesia tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data statistik kriminal Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kejahatan (*crime total*) pada tahun 2015 terdapat sebesar 352.936 tindak pidana, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 357.197 kasus tindak pidana dan selanjutnya kasus kejahatan terus menurun hingga tahun 2019. dimana pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kasus, dan 294.281 kasus di tahun 2018 selanjutnya sebanyak 269.324 kasus di tahun 2019.

Jika dilihat dari *crime total* pada tingkat provinsi atau polda selama empat tahun terakhir pada tahun 2016-2019, Provinsi Jawa timur selalu berada di urutan ketiga dengan jumlah kejahatan terbanyak di Indonesia. Namun di tahun 2015 sempat berada di urutan kedua setelah Polda metro jaya. Selama tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta atau Polda metro jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 kasus) kemudian disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 kasus) dan di urutan ketiga ada Provinsi Jawa Timur (26.985 kasus).



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Kriminalitas (*Crime Total*) Indonesia Selama Tahun 2015-2019

Sumber : BPS, Statistik Kriminal Indonesia, data diolah.

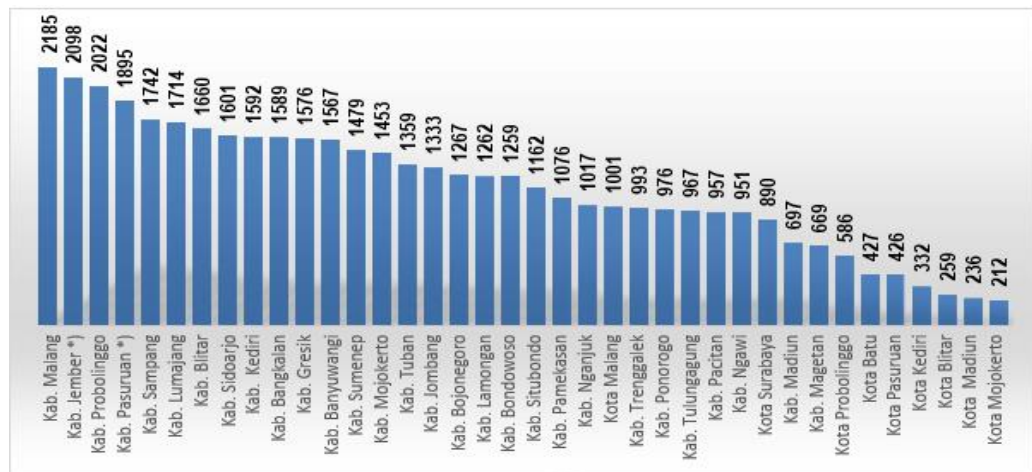
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang angka kriminalitas terbanyak di Indonesia. Tingginya jumlah tindak kriminal di suatu wilayah menggambarkan bahwa wilayah tersebut kurang aman dan menunjukkan besarnya resiko setiap penduduk menjadi korban tindak kejahatan. Meningkatnya jumlah kejahatan akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan akan rasa aman mejadi berkurang karena cenderung merasa terancam apabila keluar dari lingkungannya. Sehingga tingginya tindakan kriminal di suatu wilayah bisa saja mengakibatkan keresahan bagi kehidupan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dengan jumlah 39 juta penduduk. Hal ini menjadikan angka kejahatan dengan proporsi per 100.000 penduduk (*crime rate*) di provinsi Jawa Timur relatif lebih rendah. Berdasarkan data statistik kriminal Indonesia yang

dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa *crime rate* di Jawa Timur tahun 2019 adalah sebanyak 69 orang yang beresiko terkena kejahatan. Data kejahatan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kriminalitas (*crime rate*) di Indonesia di tahun 2019 yakni 103 per 100.000 penduduk. Adapun kasus yang paling menonjol di Jawa Timur dengan persentase kejadian tindak pidana yang dilaporkan tahun 2019 antara lain, Narkotika (15,74%) pencurian dengan pemberatan (12,91%) penipuan (12,62%) pencurian kendaraan bermotor (10,74%).

Berdasarkan gambar 1.1 angka kriminal yang terjadi di provinsi Jawa Timur yang masih tergolong tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan dan pemerintah. Banyaknya jumlah penduduk sebaiknya perlu diimbangi dengan jumlah personil polisi. Menurut pernyataan dari asisten polisi bidang sumber daya manusia, Arief Sulistyanto saat wawancara di kompleks Mabes Polri menyatakan bahwa idealnya penduduk terhadap personil polisi adalah 1 : 350 artinya di setiap 350 penduduk sebaiknya terdapat satu personil polisi (Movanita, 2017).

Penelitian yang dilakukan (Levitt, 1999) menemukan hasil bahwa salah satu faktor yang menurunkan tingkat kejahatan di Amerika Serikat di tahun 1990 ialah dengan cara menambah jumlah personil polisi. Secara teori, jumlah personil polisi dan kualitas keamanan juga dapat berpengaruh terhadap angka kejahatan. Seperti memperbesar biaya bagi pelaku tindak kejahatan (peluang tertangkap) sehingga memperkecil ekspektasi utilitas dari tindak kejahatan (Hakim, 2009).



Gambar 1.2 Besaran Rasio Penduduk terhadap Personil Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber : Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Gambar grafik diatas memperlihatkan besaran rasio penduduk terhadap personil polisi pada tingkat kabupaten dan kota Jawa Timur di tahun 2019. Kondisi rasio ideal dan mendekati rasio ideal terdapat pada 4 kota di Jawa Timur (Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar dan Kota Madiun) adapun besaran rasio tertinggi berada di kabupaten Malang memiliki besaran rasio hingga mencapai 1 : 2.185 artinya hanya ada satu personil polisi diantara 2.185 penduduk. Sementara itu, jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*) yang terjadi di kabupaten Malang terdapat sekitar 3.337 kasus di tahun 2019. Hal ini menjadikan kabupaten malang memiliki jumlah kasus kejahatan terbanyak setelah Kota Surabaya.

Selanjutnya, indikator yang biasa digunakan untuk mengukur sejauh mana tindak kejahatan yang terjadi di suatu wilayah adalah selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*). selang waktu terjadinya tindak criminal diantara beberapa provinsi di pulau jawa bisa dilihat pada tabel berikut ini.

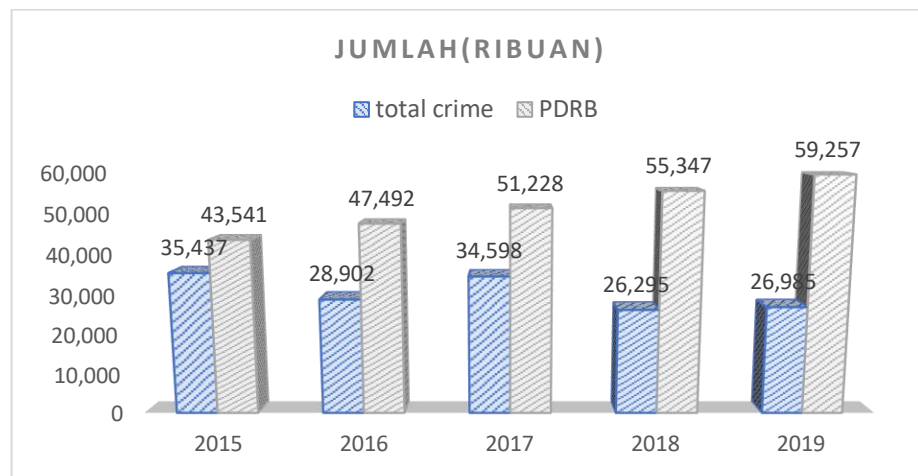
Tabel 1.1 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019

Propinsi / Tahun	2016	2017	2018	2019
Metro Jaya	00.11'59"	00.15'07"	00.15'09"	00.16'27"
Jawa Timur	00.18'11"	00.15'11"	00.19'59"	00.19'28"
Jawa barat	00.17'54"	00.20'52"	00.32'25"	00.39'59"
Jawa Tengah	00.36'37"	00.43'40"	00.57'35"	00.50'56"
Banten	01.55'00"	02.22'21"	02.25'04"	02.39'54"
DIY	01.02'57"	01.12'29"	01.18'05"	01.19'02"
Indonesia	00.01'28"	00.01'33"	00.01'47"	00.01'57"

Sumber : BPS, Statistik Kriminal Indonesia 2019, data diolah.

Data yang diambil dari statistik kriminal Indonesia diatas memperlihatkan bahwa selang waktu terjadinya kejahatan di provinsi jawa timur relatif lebih pendek dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan di Jawa Timur semakin tinggi. Sebaliknya apabila interval *crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kriminal semakin rendah.

Disisi struktur perekonomian, produk domestik bruto provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia nasional sebesar 14,67% (BPS, 2019). Tingginya angka PDRB ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah (Prakoso, 2016) Hal ini terbukti bahwa angka kriminalitas masih tergolong tinggi walaupun memiliki kontribusi cukup tinggi bagi perekonomian Nasional. Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur jumlah kriminalitas relatif menurun di 3 tahun terakhir yakni 2017 hingga 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

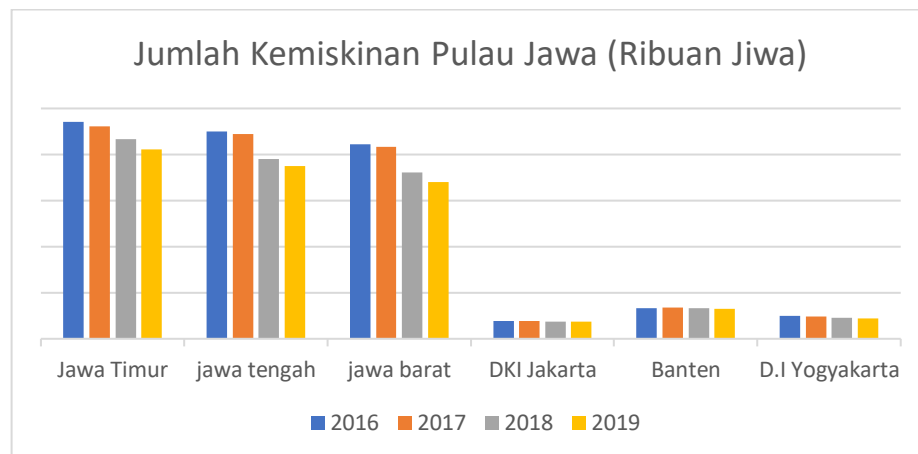


Gambar 1.3 Grafik Jumlah Kasus (*Crime Total*) dan PDRB Per Kapita di Jawa Timur Selama Tahun 2015-2019

(Sumber : Jawa Timur dalam Angka dan Statistik Kriminal Indonesia, data diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Nasional. Namun dengan adanya angka kriminalitas yang tinggi secara tidak langsung akan mengurangi kualitas perekonomian suatu wilayah. Secara umum, kejahatan dapat mengganggu kegiatan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan. Setiap kejahatan umum atau khusus seperti korupsi akan menurunkan tingkat PDRB kemudian akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi (Kusuma et al., 2019).

Faktor ekonomi lainnya adalah angka kemiskinan. Jumlah kemiskinan di Jawa Timur juga terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia terutama di pulau Jawa. Walaupun jumlah kemiskinan Jawa Timur selama 4 tahun terakhir cenderung menurun akan tetapi angka tersebut masih terbilang tinggi. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam angka tahun 2020 menunjukkan bahwa angka kemiskinan provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2019 secara rata-rata turun sebesar 4,36%. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik dibawah ini.



Gambar 1.4 Grafik Kemiskinan di Pulau Jawa (Ribu Jiwa) Tahun 2016-2019

(Sumber: Jawa Timur dalam Angka, data diolah)

Dampak nyata dari tingginya kemiskinan di suatu wilayah adalah angka kriminalitas. Secara teori, kondisi perekonomian seseorang yang rendah akan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan nantinya timbul keinginan atau hasrat melakukan tindak kriminal. Sebaliknya kondisi ekonomi orang kaya akan hidup dengan segala kemewahan dan hiburannya. Sementara itu, orang miskin memiliki pendapatan dan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Rendahnya pendapatan berarti rendahnya potensi tabungan yang berakibat pada rendahnya taraf hidup. kemiskinan yang dialami seseorang memberikan kesempatan untuk berbuat jahat (Gillani et al., 2009).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemiskinan yang juga tinggi mengindikasikan suatu wilayah mengalami ketimpangan ekonomi. Ini artinya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin suatu wilayah atau bahkan negara bisa terlepas dari masalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang semakin tinggi antar golongan maupun antar wilayah bisa memunculkan beberapa permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin lebar. Indek gini juga dapat memengaruhi jumlah tindakan

kriminal. dikarenakan, mereka yang berada di kelas ekonomi bawah (berada di bawah dalam distribusi pendapatan) cenderung sensitif dengan ketimpangan, akibatnya mereka mencari keadilan melalui tindakan yang mengarah pada kegiatan yang berisiko atau tindakan kriminal (Masfiatun, 2019).

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi juga tidak menjamin terserap nya tenaga kerja. Pengangguran yang dialami seseorang menyebabkan pendapatan berkurang dan bahkan hilang sama sekali sehingga memberikan ekspektasi utilitas kriminalitas yang lebih besar kepada calon pelaku kriminalitas (Wulansari, 2017) salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran saat ini dikarenakan orientasi ekonomi yang mengarah padat modal dan persaingan pada permintaan skill yang lebih profesional. Pendidikan dan skill yang tinggi menjadikan ketatnya persaingan di dunia kerja dan mempengaruhi seseorang mendapatkan pekerjaan legal. Ketika seseorang dalam keadaan menganggur dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap maka tidak menutup kemungkinan seseorang cenderung melakukan tindak kejahatan. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula upah yang akan di terima, dengan begitu akan memberikan ekspektasi utilitas kriminalitas yang lebih kecil kepada calon pelaku kriminal dan akan lebih memilih pekerjaan yang legal (Priatna, 2016).

Angka kriminalitas yang relatif tinggi di Jawa Timur akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan rasa keamanan dan keselamatan. Permasalahan kriminalitas di Jawa Timur seharusnya di selesaikan dengan baik melalui kebijakan publik. Menurut Hakim (2009) sebagian besar masalah kriminalitas terutama kejahatan properti hanya dianalisis dan diselesaikan dengan pendekatan hukum, kriminologi dan ilmu kepolisian. Akibatnya, seluruh keputusan kebijakan publik

yang diambil untuk menekan tingkat kejahatan sebagian besar dilakukan melalui pendekatan hukum dan kepolisian.

Padahal, analisis kejahatan juga dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Morgan Kelly (2000) menunjukkan bahwa kejahatan properti didominasi oleh motif ekonomi yang ditandai dengan signifikannya variabel-variabel seperti pengangguran, kemiskinan, struktur keluarga, populasi, ras dan aktivitas polisi. Pendekatan ekonomi juga dapat dilihat dari rasionalitas pelaku yang lebih memilih untuk memperhitungkan keuntungan yang didapat dari aksi jahatnya dengan cara merampas harta benda korban.

Berangkat dari latar belakang masalah demikian maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur dari Pendekatan Ekonomi”** untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas di Provinsi Jawa Timur dari pendekatan ekonomi. Maka dari itu variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi sejumlah faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan tingkat pengangguran

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut :

1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat kriminalitas provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi kriminalitas serta memberikan masukan pada pemerintah untuk meningkatkan keamanan di provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat untuk peneliti dan mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dan mahasiswa selanjutnya dapat memberikan informasi sebagai referensi bagi penulis yang akan melanjutkan penelitian.